



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER
UNIT KERJA : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERWAN WAHYUDI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 891592

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.120.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 27890 m2 di KAB / KOTA PASER, WARISAN Rp. 305.000.000
3. Tanah Seluas 371 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , LAINNYA Rp. 125.000.000
4. Tanah Seluas 403 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, LAINNYA Rp. 105.000.000
5. Tanah Seluas 765 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **291.450.000**

1. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
3. LAINNYA, PASIFIC INVERT 20 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000
4. LAINNYA, PASIFIC 2980-rx-9-0 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



5. LAINNYA, EXOTIC (SEPEDA) 9982 Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 1.100.000
6. LAINNYA, BMX 18 INCH EXOTIC Sepeda BMX 18 Inch Exotic
9987 SK Minion Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 180.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.431.840.109

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.023.290.109

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.023.290.109

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.